

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan sikap dan kebijakan aktor-aktor eksternal terkait dengan deklarasi kemerdekaan yang Kosovo pada tahun 2008. Uni Eropa dan Rusia sebagai aktor eksternal akan menjadi bahasan utama di dalam penelitian ini, dimana keduanya memanfaatkan segala aspek kekuatannya untuk merespon deklarasi kemerdekaan Kosovo. Selanjutnya, sikap dan kebijakan tersebut akan dianalisa melalui perspektif *Security Complex*, atau secara lebih khusus, konsep *amity-enmity*, sehingga akan terlihat lebih jelas sejauh mana dan mengapa Uni Eropa serta Rusia menanamkan perannya di Kosovo.

Pada abad ke 13, Kosovo menjadi bagian dari Kerajaan Serbia. Sebuah tonggak penting adalah Pertempuran Kosovo 1389 yang membuat wilayah tersebut menjadi bersejarah, dimana Raja Nemanja dari Serbia mengambil keuntungan dari melemahnya kekaisaran Romawi untuk merebut apa yang sekarang disebut Kosovo, dan wilayah lain. Hingga di kemudian hari Kosovo menjadi pusat negara Serbia. Konflik Kosovo bermula pada tahun 1989 ketika Presiden Republik Sosialis Yugoslavia yang baru saja terpilih, Slobodan Milosevic, mengisyaratkan niatnya untuk kembali menegaskan dominasi Serbia di dalam federasi yaitu dengan mencabut status otonomi Kosovo dan Vojvodina. Akibatnya lebih dari 100,000 orang Albania terpaksa kehilangan pekerjaannya, hak-hak mereka dicabut salah satunya dengan menutup lembaga pendidikan dan menutup lapangan pekerjaan yang isinya adalah orang-orang Albania.

Kebijakan yang menindas ini kemudian memperkuat dinamika separatisme di Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia, yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi Yugoslavia. Keadaan yang semakin tidak terkontrol dan dipenuhi oleh kekerasan kemudian menimbulkan beragam permasalahan yang semakin kompleks, hingga pada akhirnya muncul dorongan untuk membentuk militansi Albania-Kosovo dalam bentuk paramiliter. Pada tahun 1992 kemudian muncul sebuah gerakan *Albanian Shadow Government* yang tergabung dalam *Kosovo Liberation Army*. Tekanan internasional terhadap Milosevic pun mulai

bermunculan dan meningkat hingga akhir tahun 1998. Masyarakat internasional meminta kepada kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedua aktor eksternal Uni Eropa dan Rusia pun merespon Konflik di Kosovo ini dengan pendekatan yang berbeda, dimana sarat akan kepentingan-kepentingan di dalamnya.

Perspektif Security Complex menganalisa bahwa Reaksi Uni Eropa dan Russia sehubungan dengan sebelum dan pasca kemerdekaan Kosovo telah menghasilkan sejumlah interaksi kekuatan besar dalam dua kompleksitas keamanan wilayah yang terpisah namun berdampingan, yaitu EU-Eropa-RSC dan Post-Soviet-RSC. Hal ini dikarenakan proyeksi 2 (dua) kekuatan besar di wilayah yang berdekatan, yaitu UE dan Russia, sehingga menghasilkan dinamika keamanan antardaerah, yang merupakan indikasi untuk memperkuat keberlangsungan super-kompleksitas di keseluruhan Eropa.

Kebijakan UE terhadap Balkan mencakup berbagai masalah, meskipun isu-isu utama berada di bawah Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa (CFSP) dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP). Sepanjang sebagian besar sejarahnya, kawasan Balkan dikenal karena konflik, perang, kerusuhan, kediktatoran keras, dan jalur perkembangan yang buruk. Setelah peperangan pada tahun 1990-an sebagai akibat dari pecahnya Yugoslavia, tampaknya hal-hal telah menjadi lebih baik bagi kawasan ini. Ada beberapa argumen utama untuk menjelaskan hal tersebut, salah satunya adalah Balkan menginginkan integrasi UE. Berdasarkan prinsip HAM dan Demokrasi dengan karakteristik UE, tujuan akhir dari intervensi dan integrasi diantaranya adalah untuk membangun semua struktur yang diperlukan untuk melakukan proses integrasi Eropa, sementara itu menyebarluaskan mekanisme integrasi kepada Kosovo. Hal yang tak kalah penting adalah untuk mengadopsi *Ahtisaari plan* sebelum konstitusi sebagai salah satu kondisi kemerdekaan yang disepakati secara internasional.

Beberapa kebijakan pun dilakukan oleh UE seperti Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP), yang berusaha untuk melengkapi kekuatan UE melalui pengembangan kemampuan militer. Awalnya ESDP dianggap sebagai instrumen yang berpotensi bersifat koersif, namun hal ini segera menjadi sesuatu yang lebih

berfokus pada manajemen konflik. Dengan demikian, ESDP telah dilengkapi oleh pengembangan dari kemampuan manajemen krisis sipil. Kebijakan kedua ialah *European Union Rule of Law Mission (EULEX)*, yang mana berisi pengakuan UE bahwa kemajuan supremasi hukum di Kosovo sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang tercermin diseluruh upaya eksternal dan terutama terwujud melalui misi penyebaran aturan hukum yang luas.

Sementara itu, kehadiran politik Rusia di kawasan Balkan memiliki tradisi yang cukup panjang. Selama berabad-abad dan saat ini, kepentingan Rusia terfokus pada isu-isu seperti persaingan geopolitik terhadap kekuatan lain, aspek ekonomi, keamanan dan aspek budaya keagamaan Orthodox yang dianut mayoritas negara-negara Balkan. Kawasan Balkan Barat merupakan salah satu wilayah kepentingan yang sangat vital bagi Rusia. Kita dapat melihat keterlibatan Rusia dalam menyelesaikan isu-isu kontroversial di Balkan – Mediasi di Bosnia-Herzegovina dan Kosovo- keduanya merupakan instrumen yang dimanifestasikan dalam kebijakan standar ganda. Di satu sisi Rusia membantu menstabilkan situasi dan menjamin keamanan di kawasan tersebut. Di sisi lain, Rusia membela integritas teritorial Serbia yang notabennya sebagai sekutu tradisionalnya sehingga menentang pengakuan kemerdekaan atas Kosovo.

Kebijakan yang dikeluarkan Rusia memang cenderung samar, berbeda dengan sikap Uni Eropa. Rusia hanya menunjukkan sikap-sikap penentangan, seperti terlihat pada tanggal 17 Februari tahun 2008, ketika Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya untuk kedua kalinya, acara tersebut menandai episode terbaru dalam pemotongan bekas Yugoslavia. Tidak seperti yang terjadi pada tahun 1991, negara yang baru dibentuk itu segera diakui oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Turki, dan banyak negara lainnya, sementara Rusia bersekutu dengan Serbia untuk menentang kemerdekaannya. Pandangan resmi Rusia tentang situasinya adalah bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo bertentangan dengan hukum internasional. Bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo telah melanggar kedaulatan Republik Serbia, Piagam Persarikatan Bangsa-Bangsa , UNSCR 1244, prinsip-prinsip *Helsinki Final Act*, kerangka konstitusi Kosovo dan

perjanjian *Contact Group* tingkat tinggi dan peringatan komunitas internasional mengenai resiko peningkatan ketegangan dan kekerasan antar etnis di provinsi ini dan konflik baru di Balkan.

Dalam permasalahan yang menyangkut *amity-enmity* kita dapat merangkumnya menjadi 3 kategori besar diantaranya adalah; konflik tipe kompleks, yang dicirikan oleh hubungan permusuhan, dengan kemungkinan konflik akan terus meningkat; kompleks dimana terdapat tingkat permusuhan rendah, khususnya untuk rezim keamanan; dan yang ketiga didasarkan kepada pola *amity*, yang membentuk komunitas keamanan. Menilik dari adanya pertentangan kepentingan antara EU dan Rusia, terlihat jelas bahwa pola hubungan lebih mengarah pada *enmity*, daripada *amity*. EU berpandangan bahwa ia harus turun di konflik Kosovo ini guna melancarkan rencana integrasi terhadap negara- negara Balkan yang telah diusungnya sejak lama, sedangkan bagi Rusia, kemerdekaan Kosovo merupakan hal yang salah di mata hukum internasional. Terlebih, Rusia akan mengalami kerugian yang cukup besar karena kawasan Balkan Barat merupakan kawasan yang penting bagi seluruh aspek Rusia, termasuk Kosovo didalamnya.